

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut sebagai *good government governance* diseluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dengan bergulirnya otonomi daerah merupakan bagian dari reformasi hidup dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah kebijakan pemerintah pusat dalam segelintir bidang diubah menjadi kebijakan daerah termasuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Seiring diberlakukannya otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah memberikan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Termasuk kewenangan keuangan guna melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik dan budaya, diperlukan suatu informasi akuntansi yang akurat yaitu berupa laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Laporan Keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung

informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari penerapan akuntansi di dalam penyusunan laporan keuangan daerah salah satunya adalah sistem akuntansi. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Namun dalam aplikasinya di pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan dan belum memahami sistem akuntansi. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota, mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan

Daerah dan juga didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pasal 232 yang mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan suatu standar penyusunan laporan keuangan milik pemerintahan dalam bentuk prinsip-prinsip akuntansi untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah. Dengan demikian, standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan dalam menyusun laporan keuangan untuk menyajikan informasi yang relevan, andal dan dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh data transaksi yang dicatat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Begitu juga dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang setiap tahunnya mendapat penilaian dari auditor pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berupa opini.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan 4 macam opini yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan menolak memberi opini atau tidak memberi pendapat (*Disclaimer*). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini berarti laporan keuangan yang dilaporkan oleh pemerintah daerah sudah memenuhi syarat atau dapat dikatakan laporan keuangan sudah disajikan dan diungkapkan secara relevan, andal, dapat dipercaya dan dapat dibandingkan.

Berikut ini hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2014-2018:

Tabel 1.1
Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Rokan Hulu

NO	TAHUN	HASIL OPINI
1	2014	WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian-Dengan Paragraf Penjelas)
2	2015	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
3	2016	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
4	2017	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
5	2018	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Riau, 2020

Dari tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rokan Hulu kondisinya cukup baik dan untuk periode anggaran tiga tahun terakhir (2016-2018) mendapat opini terbaik yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil opini ini diperoleh tentunya dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah menerapkan dengan baik Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan milik pemerintah daerah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dalam menyajikan laporan keuangan.

Pemerintah Daerah diharapkan mampu menerapkan sistem akuntansi keuangannya dengan baik dan sesuai dengan perundang-undangan sehingga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan dan ketidakefektifan. Hal ini penting karena mengingat bahwa

karakteristik kualitatif merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan (Harto, 2010).

Kabupaten Rokan Hulu sebagai kabupaten pemekaran yang resmi berdiri sejak tahun 1999 terus berkembang dan berbenah dalam berbagai pembangunan fisik maupun non fisik yang dilaksanakan setiap tahunnya termasuk berbenah untuk menerapkan sistem akuntansi keuangan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk mempertahankan hasil opini terbaik atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rokan Hulu maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu harus secara berkesinambungan dan konsisten untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi semua pemerintah daerah di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan mengambil judul yaitu: **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: “Apakah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang ilmu akuntansi secara umum dan mengetahui pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran untuk dijadikan masukan dan pertimbangan guna meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Bagi peneliti lainnya, dapat dijadikan sebagai informasi dan referensi tambahan untuk penelitian yang sama.

1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penelitian ini dibatasi pembahasannya supaya tidak melenceng dari topik penelitian. Penelitian

ini hanya menganalisis pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu khusus pada dinas saja. Sedangkan penerapan pada badan, satuan, kecamatan, sekretariat, dan inspektorat tidak dibahas.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Angga Dwi Permadi (2013) dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Bina Marga di Kota Bandung). Hasil penelitian replikasi menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah di Dinas Bina Marga Kota Bandung sudah memenuhi beberapa kriteria yaitu: andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sehingga disimpulkan bahwa laporan keuangan pada penelitian replikasi tersebut merupakan laporan keuangan yang berkualitas dan penerapan sistem keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Dinas Bina Marga Kota Bandung.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian replikasi terdapat pada tahun pengamatan, pada penelitian replikasi adalah tahun 2013 sedangkan pada penelitian ini tahun 2020. Objek pada penelitian replikasi dilakukan pada Dinas Bina Marga Kota Bandung sedangkan dalam penelitian ini pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan originalitas, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai teori-teori atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan literatur dan sumber sumber yang relevan serta membahas kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil penelitian beserta pembahasannya sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut PP Nomor 71 tahun 2010 Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya

Menurut Mamduh, dkk (2012) akuntansi bisa didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (*judgement*) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut. Karena biasanya pemakai hanya bisa menampung dan menganalisis informasi yang terbatas, maka tujuan pelaporan akuntansi adalah membuat sistem pemrosesan dan komunikasi yang meringkas informasi perusahaan yang sangat banyak kedalam bentuk yang bisa dipahami.

Jadi akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam mengambil keputusan ekonomi dan membuat pilihan-pilihan nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan

2.1.2 Sistem Akuntansi

Setiap sistem dibuat untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi.

Menurut Mursyidi (2010) “Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan”

Menurut pendapat yang disampaikan oleh Alam (2014) sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan, serta pelaporan data keuangan. Akuntansi, dalam hal ini, harus menciptakan suatu cara sedemikian rupa sehingga mempermudah pengendalian intern dan menciptakan arus laporan yang tepat untuk kepentingan manajemen.

2.1.3 Akuntansi Pemerintahan

Menurut Mursyidi (2010) akuntansi pemerintahan (*governmental accounting*) banyak menyatakan terminologi lama dan bergeser ke istilah akuntansi sektor publik. Akuntansi pemerintahan adalah mekanisme akuntansi yang memproses transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Menurut Nordiawan (2017) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Akuntan pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara. Selain itu, bidang ini meliputi pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara, termasuk kesesuaiannya dengan UU yang berlaku.

2.1.4 Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Muindro (2013) standar akuntansi pemerintah sebagai berikut:

- a. Kedudukan SAP, sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Dengan demikian setiap entitas pelaporan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menerapkan SAP.
- c. Ruang lingkungannya, SAP diterapkan dilingkup pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah.
- d. Proses penyiapan SAP merupakan mekanisme prosedural yang meliputi kegiatan yang dilakukan dalam setiap PSAP oleh Komite.
- e. Proses penyiapan SAP yang digunakan ini adalah proses yang berlaku umum secara internasional dengan penyusunan terhadap kondisi yang ada di Indonesia. Penyusunan dilakukan karena pertimbangan kebutuhan yang mendesak.

Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan (PP No. 71 Tahun 2010). Dengan ditetapkannya SAP, diharapkan dapat terciptanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan sendiri perlu dikembangkan untuk memperbaiki praktik akuntansi keuangan pada lingkungan organisasi pemerintahan (Mahmudi, 2011).

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah maka laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari 7 jenis laporan keuangan yaitu: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

2.1.5 Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Menurut Nordiawan (2017) sistem akuntansi pemerintahan (sektor publik) memiliki tiga tujuan pokok yaitu:

1. Pertanggung jawaban

Akuntansi pemerintah harus memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab pada operasi unit-unit yang ada dalam pemerintahan.

2. Manajerial

Tujuan manajerial ini perlu dikembangkan agar organisasi pemerintahan tingkat atas dan menengah dapat mengandalkan informasi keuangan atas pelaksanaan sebelumnya untuk membuat keputusan atau menyusun perencanaan masa yang akan datang.

3. Pengawasan

Akuntansi pemerintahan harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien supaya terhindar dari penyalahgunaan.

2.1.6 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan pada sektor publik, pengambilan keputusan terkait dengan keputusan baik pada sektor ekonomi, sosial dan politik. (Mahsun dkk, 2016).

Menurut Abdul Halim, dkk (2010) mengutip dari Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 pasal 70 ayat (1) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut:

1. Produser Akuntansi Penerimaan Kas

Menurut Abdul Halim, dkk (2010) akuntansi penerimaan kas adalah serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada SKPD dan/Atau SKPKD.

Sedangkan menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 241 mengatakan bahwa prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan,

pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas adalah sebagai berikut:

- a. Surat tanda bukti pembayaran
- b. STS
- c. Bukti transfer; dan
- d. Nota kredit Bank.

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Halim, dkk (2010) adalah serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/ atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/ atau SKPKD. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup sebagai berikut:

- a. SP2D
- b. Nota debet Bank; dan
- c. Bukti transaksi pengeluaran lainnya

3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap

Menurut Abdul Halim, dkk (2010) prosedur akuntansi asset adalah serangkaian proses, baik manual maupun komputerisasi, mulai dari pencatatan

dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitas, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap asset yang dikuasai/digunakan skpd dan/atau SKPKD. Prosedur akuntansi asset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan asset yang dikuasai/digunakan SKPD dan/ atau SKPKD.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi asset tetap sebagai berikut:

- a. Jenis/ nama aset tetap
- b. Kode rekening
- c. Klasifikasi aset tetap
- d. Nilai aset tetap; dan
- e. Tanggal transaksi/ kejadian

4. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi selain kas adalah meliputi serangkaian proses, manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan, transaksi atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi dan/ atau kejadian keuangan selain kas pada SKPD dan/ atau SKPKD. (Abdul Halim dkk, 2010).

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 259 mengatakan bahwa prosedur akuntansi selain kas adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua

transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas sebagai berikut:

- a. Surat keputusan mutasi barang.
- b. Berita acara pemusnahan barang.
- c. Berita acara serah terima barang.
- d. Berita acara penilaian.
- e. Berita acara penyelesaian pekerjaan.

2.1.7 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Angga Dwi Permadi (2013) Kualitas Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan.

Menurut Quality Financial Reporting IFRS (*International Financial Reporting Standard*) Deloitte ada cara lain untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, yaitu:

- a. Menggunakan gaya bahasa yang sederhana dan mudah untuk dipahami.
- b. Mengidentifikasi dan menjelaskan hal apa saja yang menjadi penyebab dari adanya perubahan, perubahan yang dimaksudkan disini yaitu perubahan keadaan ataupun perubahan dari standar akuntansi.
- c. Meningkatkan proses dan prosedur untuk memilih perkiraan, merumuskan penilaian, dan juga memilih prinsip yang lebih sederhana.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 71 (2010) bahwa karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yakni:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau laporan

keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Cukup banyak penelitian yang telah dilakukan terkait dengan penelitian penulis, beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Angga Dwi Permadi (2013) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Bina Marga Di Kota Bandung). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan

sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini yaitu karyawan atau staff yang berada di Dinas Bina Marga di Kota Bandung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data angket (kuisisioner) yang disebar kepada responden atau karyawan di Dinas Bina Marga di kota Bandung. Dari total 30 kuisisioner yang disebar, hanya 25 kuisisioner dari responden yang kembali dan dapat diolah. Teknik pemilihan sampel yaitu *non probability sampling*. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis koefisien korelasi *rank spearman* pada taraf signifikansi sebesar 5%. Program yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan *Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Ver. 19.00*. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis korelasi *rank spearman* menunjukkan nilai koefisien korelasi *rank spearman* sebesar 0,506, nilai koefisien ini menunjukkan bahwa nilai r 0,506 memiliki tingkat hubungan yang sedang dimana hasil berada diantara $0,40 < 0,506 < 0,599$, serta nilai positif menunjukkan peningkatan searah jika X naik maka Y naik atau sebaliknya. Selain itu hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa hanya 25,6% kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, dengan kata lain masih ada variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sebesar 74,4% diluar variabel independen

yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan untuk hasil perbandingan nilai t hitung dengan t tabel menunjukkan hasil t hitung sebesar 2,818 dan t tabel sebesar 2,068. Dari hasil pengujian tersebut t hitung $>$ t tabel yaitu $2,818 > 2,068$ yang berarti H_0 ditolak atau H_a diterima. Dengan kata lain berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pravitasari Eka Ningtyas (2015) dengan judul Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan data kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sidoarjo sudah sangat efektif, sedangkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo pun sudah sangat berkualitas.
3. Tutun Hermawanto Botutehe (2013) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara penelitian dengan analisis regresi linier sederhana. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo.

2.3 Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan variabel dalam penelitian ini maka penulis membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

Dari latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- Ho: Diduga penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu.
- Ha: Diduga penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dimana OPD yang dijadikan objek penelitian adalah dinas-dinas yang ada di Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan oleh penulis ini adalah penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan secara cermat dan sistematis fakta, gejala, fenomena, opini atau pendapat, sikap, dan menggambarkan (*to describe*) suatu kejadian atau peristiwa (Sugiyono, 2012). Artinya dalam penelitian ini penulis menjelaskan dan mendeskripsikan variabel dalam penelitian yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan kualitas Laporan Keuangan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan data penelitian.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2012). Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang berjumlah sebanyak 45 OPD dengan rincian lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Daftar Populasi Penelitian

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
7	Dinas Lingkungan Hidup
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11	Dinas Perhubungan
12	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
17	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
18	Dinas Peternakan dan Perkebunan
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23	Badan Pendapatan Daerah
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
25	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
27	Sekretariat Daerah
28	Sekretariat DPRD
29	Inspektorat
30	Kecamatan Rambah
31	Kecamatan Tambusai
32	Kecamatan Rokan IV Koto
33	Kecamatan Kepenuhan

34	Kecamatan Kunto Darussalam
35	Kecamatan Ujung Batu
36	Kecamatan Tandun
37	Kecamatan Kabun
38	Kecamatan Rambah Samo
39	Kecamatan Rambah Hilir
40	Kecamatan Bangun Purba
41	Kecamatan Tambusai Utara
42	Kecamatan Bonai Darussalam
43	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
44	Kecamatan Kepenuhan Hulu
45	Kecamatan Pendalian IV Koto

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan teknik *non probability sampling*. Teknik *non probability sampling* atau sampling non probabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga sampel yang digunakan adalah benar-benar dapat mewakili (*representative*) dan dapat menggambarkan populasi sebenarnya. Tidak semua populasi dijadikan sampel penelitian sehingga penulis menggunakan 19 sampel penelitian yaitu dinas-dinas yang ada di Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Adapun rincian lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Daftar Sampel Penelitian

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman

5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
7	Dinas Lingkungan Hidup
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11	Dinas Perhubungan
12	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
17	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
18	Dinas Peternakan dan Perkebunan
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yang dimaksud disini adalah data belum jadi berbentuk kuisisioner yang disebarkan kepada para responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu 19 responden penelitian pada dinas-dinas yang ada di Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber primer yaitu data yang diperoleh secara langsung tanpa melalui pihak perantara dengan menyebarkan kuisisioner (angket) kepada dinas-dinas yang ada di Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai responden penelitian yaitu sebanyak 19 dinas yang ada di Rokan Hulu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik angket atau kuisisioner. Dalam hal ini, penulis mengambil data dari para responden dengan menyebarkan kuisisioner yang diisi oleh para bendahara atau kasubag keuangan pada dinas-dinas yang ada di Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Kuisisioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan peneliti mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang terutama didalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau sistem yang sudah ada. Teknik kuisisioner ini memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan atau pernyataan yang diajukan. Kuisisioner penelitian ini penulis distribusikan secara langsung kepada para responden penelitian yaitu bendahara atau kasubag keuangan pada dinas-dinas yang ada di Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 19 dinas.

3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel Bebas/Independen (X)

Yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh organisasi guna memudahkan pengelolaan suatu organisasi. Penulis mengajukan kuisisioner kepada responden penelitian untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntansi Keuangan

Pemerintah Daerah di Kabupaten Rokan Hulu pada 19 dinas yang menjadi responden penelitian.

2. Varibel Terikat/Dependen (Y)

Yaitu kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi yang dilaksanakan oleh dinas-dinas yang ada di Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Penulis mengajukan kuisisioner kepada responden penelitian untuk mengetahui kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Rokan Hulu pada 19 dinas yang menjadi responden penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Persamaan Regresi Linier Sederhana

Uji regresi yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana yang dihitung dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 18. Analisis regresi linier sederhana digunakan karena variabel independen atau variabel bebasnya hanya satu variabel. Adapun persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a dan b = Bilangan Konstanta

X = Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

3.7.2 Uji Koefisien Korelasi

Untuk menghitung korelasi (hubungan) antara variabel X dan Y maka digunakan uji koefisien korelasi (r). Uji ini untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien korelasi antara nol dan satu. Nilai r yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas sedangkan jika nilainya mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Besarnya koefisien korelasi dihitung dengan aplikasi SPSS versi 18 dengan melihat angka r berdasarkan output SPSS.

Klasifikasi hubungan antara variabel penelitian ditentukan dengan menggunakan berpedoman kepada kriteria di bawah ini:

Tabel 3.3
Klasifikasi Korelasi Variabel Penelitian

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,80-1,000	Sangat Kuat
0,60-0,799	Kuat
0,40-0,599	Cukup Kuat
0,20-0,399	Rendah
0,00-0,199	Sangat Rendah

Sumber: Sugiyono, 2012

3.7.3 Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis (uji t) dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kemampuan variabel independen (Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah) dalam menjelaskan variabel dependen (Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$). Menurut Sugiyono (2012) pengambilan

keputusan uji hipotesis parsial dapat mengacu pada dua hal yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel atau dengan membandingkan nilai signifikan dengan nilai probabilitas 0,05. Dasar keputusan uji hipotesisnya yaitu:

1. Jika nilai t hitung $>$ nilai t tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sebaliknya jika nilai t hitung \leq nilai t tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y.
2. Jika nilai signifikansi \leq nilai probabilitas 0,05 artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sebaliknya jika nilai signifikansi $>$ nilai probabilitas 0,05 artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y.